

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000  
TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001  
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN  
GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA,  
DAN PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama;

Mengingat:

1. asal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005.

#### Pasal 2

- (1) Gaji pokok Hakim yang selama ini diberikan berdasarkan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001, terhitung mulai 1 Januari 2006 disesuaikan dengan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
- (2) Rincian penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 3

- (1) Penetapan gaji pokok yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 4

Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama masih berkedudukan di bawah Hakim Pratama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, digaji berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR: 2 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000  
 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA  
 USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001  
 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI  
 HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN  
 PERADILAN AGAMA

KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN.  
 GOLONGAN III

MKG	a		b	
	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.485.000	1.633.500	1.529.600	1.682.500
1				
2	1.550.200	1.705.200	1.596.700	1.756.300
3				
4	1.618.200	1.780.000	1.666.700	1.833.400
5				
6	1.689.200	1.858.100	1.739.900	1.913.900
7				
8	1.763.400	1.939.700	1.816.300	1.997.900
9				
10	1.840.700	2.024.800	1.896.000	2.085.600
11				
12	1.921.500	2.113.700	1.979.200	2.177.100
13				
14	2.005.800	2.206.400	2.066.000	2.272.600
15				
16	2.093.900	2.303.300	2.156.700	2.372.400
17				
18	2.185.800	2.404.300	2.251.300	2.476.500
19				
20	2.281.700	2.509.900	2.350.100	2.585.200
21				
22	2.381.800	2.620.000	2.453.300	2.698.600
23				
24	2.486.400	2.735.000	2.560.900	2.817.000
25				

26	2.595.500	2.855.000	2.673.300	2.940.700
27				
28	2.709.400	2.980.300	2.790.700	3.069.700
29				
30	2.828.300	3.111.100	2.913.100	3.204.400
31				
32	2.952.400	3.247.600	3.041.000	3.345.100

GOLONGAN III

MKG	c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.575.400	1.733.000	1.622.700	1.785.000
1				
2	1.644.600	1.809.000	1.693.900	1.863.300
3				
4	1.716.700	1.888.400	1.768.300	1.945.100
5				
6	1.792.100	1.971.300	1.845.900	2.030.400
7				
8	1.870.700	2.057.800	1.926.900	2.119.500
9				
10	1.952.800	2.148.100	2.011.400	2.212.600
11				
12	2.038.500	2.242.400	2.099.700	2.309.700
13				
14	2.128.000	2.340.800	2.191.800	2.411.000
15				
16	2.221.400	2.443.500	2.288.000	2.516.800
17				
18	2.318.900	2.550.800	2.388.400	2.627.300
19				
20	2.420.600	2.662.700	2.493.300	2.742.600
21				
22	2.526.900	2.779.600	2.602.700	2.863.000
23				
24	2.637.800	2.901.600	2.716.900	2.988.600
25				
26	2.753.500	3.028.900	2.836.100	3.119.800
27				
28	2.874.400	3.161.800	2.960.600	3.256.700
29				
30	3.000.500	3.300.600	3.090.500	3.399.600
31				
32	3.132.200	3.445.400	3.226.200	3.548.800

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR: 2 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000  
 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA  
 USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001  
 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
 NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN  
 GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA,  
 DAN PERADILAN AGAMA

KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN.  
 GOLONGAN IV

MKG	a		b	
	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.671.400	1.838.500	1.721.500	1.893.700
1				
2	1.744.700	1.919.200	1.797.100	1.976.800
3				
4	1.821.300	2.003.400	1.875.900	2.063.500
5				
6	1.901.200	2.091.400	1.958.300	2.154.100
7				
8	1.194.700	2.183.100	2.044.200	2.248.600
9				
10	2.162.700	2.278.900	2.133.900	2.347.300
11				
12	2.162.700	2.483.400	2.227.600	2.450.300
13				
14	2.157.600	2.483.400	2.325.300	2.557.900
15				
16	2.356.700	2.592.300	2.427.400	2.670.100
17				
18	2.460.100	2.706.100	2.533.900	2.787.300
19				
20	2.568.100	2.824.900	2.645.100	2.909.600
21				
22	2.680.800	2.948.800	2.761.200	3.038.300
23				
24	2.798.400	3.078.300	2.882.400	3.170.600
25				
26	2.921.200	3.213.300	3.008.900	3.309.800

27				
28	3.049.400	3.354.400	3.140.900	3.455.000
29				
30	3.183.300	3.501.600	3.278.800	3.606.600
31				
32	3.323.000	3.655.300	3.422.600	3.764.900

-----  
 -----  
 COLONGAN IV  
 -----

MKG	c		d		e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.773.200	1.950.500	1.826.400	2.009.000	1.881.200	2.069.300
1.						
2.	1.851.000	2.036.100	1.906.500	2.097.200	1.963.700	2.160.100
3						
4	1.932.200	2.125.400	1.990.200	2.189.200	2.049.900	2.254.900
5						
6	2.017.000	2.218.700	2.077.500	2.285.300	2.139.900	2.353.800
7						
8	2.105.500	2.316.100	2.168.700	2.385.600	2.233.800	2.457.100
9						
10	2.197.900	2.417.700	2.263.900	2.490.300	2.331.800	2.565.000
11						
12	2.294.400	2.523.800	2.363.200	2.599.500	2.434.100	2.677.500
13						
14	2.395.100	2.634.600	2.466.900	2.713.600	2.540.900	2.795.000
15						
16	2.500.200	2.750.200	2.575.200	2.832.700	2.652.500	2.917.700
17						
18	2.609.900	2.870.900	2.688.200	2.957.000	2.768.900	3.045.800
19						
20	2.724.500	2.996.900	2.806.200	3.086.800	2.890.400	3.179.400
21						
22	2.844.000	3.128.400	2.929.300	3.222.300	3.017.200	3.319.000
23						
24	2.968.800	3.265.700	3.057.900	3.363.700	3.149.600	3.464.600
25						
26	3.099.100	3.409.000	3.192.100	3.511.300	3.287.900	3.616.700
27						
28	3.235.100	3.558.700	3.332.200	3.665.400	3.432.200	3.175.400
29						
30	3.377.100	3.714.800	3.478.400	3.826.300	3.582.800	3.941.100
31						
32	3.525.300	3.877.900	3.631.100	3.994.200	3.740.000	4.114.000

-----  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO